



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PEDESAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGITO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **644047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
7. Tanah Seluas 1.486 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **182.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



29.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.830.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	388.715.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.788.545.000
III. HUTANG	Rp.	601.545.853
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.186.999.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.